

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL

TAHUN 2023-2026



Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 73 (Komplek Perkantoran) Marabahan, 70513
Telp/fax (0511) 4799222

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya **Rencana Strategi (RENSTRA)** Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) ini memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Dinas Sosial Barito Kuala selama 5 (lima) tahun mendatang yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2023-2026 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) ini.

Marabahan, 18 April 2023

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Kuala**

H. FUAD SYEKH, S.Sos, M.AP
NIP. 197010221991011001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

 1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 8

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial..... 8

 2.1.1 Tugas 8

 2.1.2 Fungsi 8

 2.1.3 Struktur Organisasi 9

 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial 12

 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.... 12

 2.2.2 Jumlah Pegawai yang Telat Mengikuti Pelatihan
 Penjenjangan 12

 2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... 13

 2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan
 Eselonisasi 14

 2.2.5. Fasilitas Pelengkapan 14

 2.3 Kinerja Pelayanan 14

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL 20

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Dinas Sosial 20

 3.1.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis 21

 3.1.2 Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal... 22

 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program 22

 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga..... 23

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
 Hidup Strategis 24

 3.5 Tantangan dan Peluang 24



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 27

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 29

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF 31

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 34

BAB VIII PENUTUP 36

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel	2.2.	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	12
Tabel	2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel	2.4.	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	14
Tabel	2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Barito Kuala	16
Tabel	2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Barito Kuala	18
Tabel	4.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala 2023-2026	28
Tabel	5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	30
Tabel	6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator	32
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan SOTK Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Awal	10
-------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan suatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah perlu disusun untuk dipedomani dalam menyusun perencanaan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Rencana pembangunan daerah berupa Dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala menyusun serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen dinas dalam rangka pencapaian tujuan, yang tentunya merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 didasari dari Visi dan Misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005-2025 (sesuai Peraturan Daerah No.03 Tahun 2012) dalam **Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.**

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2012-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala;
12. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
13. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
15. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025;



- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk:

- 1. Memberikan arah dan pedoman serta mendayagunakan seluruh potensi yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam menjawab tuntutan perkembangan permasalahan dan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu ;
- 2. Mempermudah pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala baik secara internal maupun eksternal; dan
- 3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 adalah:



- 1) Agar dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan.
- 2) Agar dapat memberikan layanan prima dalam usaha kesejahteraan sosial dengan melibatkan seluruh pelaku (*stakeholder*) penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- c. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)
- d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- e. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai instansi Pemerintah dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala bertugas melaksanakan urusan di Bidang Sosial dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

2.1.1. Tugas (Perbup. 105 Tahun 2021)

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.1.2. Fungsi (Perbup. 105 Tahun 2021)

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melaksanakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial

- 
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial

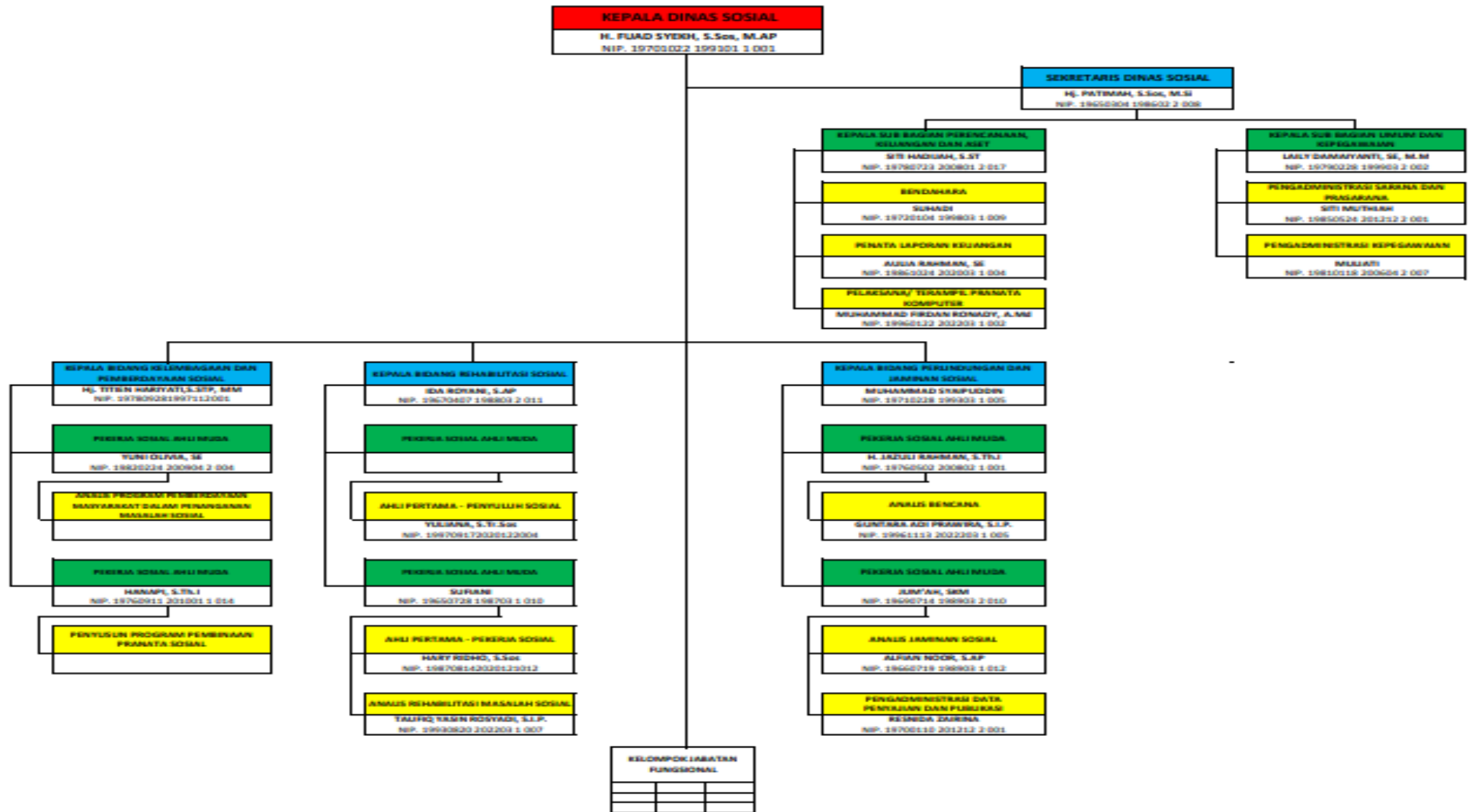
Struktur organisasi Dinas Sosial setelah penyetaraan jabatan fungsional terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Sosial.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Dinas Sosial dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
3. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari (a) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, (b) Seksi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
 - b. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari (a) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza, (b) Seksi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari (a) Seksi Perlindungan Sosial dan Bencana, (b) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Kelompok Jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisi meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

Gambar 2.1.

Bagan SOTK Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA



2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala berjumlah 21 orang, yang terdiri dari 12 orang laki - laki dan 9 orang perempuan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Strata 3	- Orang Pria	0.00%
		- Orang Wanita	0.00%
2	Strata 2	1 Orang Pria	3.70%
		2 Orang Wanita	7.41%
3	Strata 1	8 Orang Pria	29.63%
		4 Orang Wanita	14.81%
4	Strata D III	1 Orang Pria	0.00%
		0 Orang Wanita	0.00%
5	SLTA	2 Orang Pria	7.41%
		3 Orang Wanita	0.00%
Jumlah		12 Orang Pria	44.44%
		9 Orang Wanita	33.33%

2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Jenis Diklat Penjenjangan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Diklat Pim II	1 Orang Pria	7.69%
		- Orang Wanita	0.00%
2	Diklat Pim III	0 Orang Pria	0.00%
		1 Orang Wanita	0.00%
3	Diklat Pim IV	3 Orang Pria	30.00%
		4 Orang Wanita	40.00%
Jumlah		4 Orang Pria	40.00%
		5 Orang Wanita	50.00%

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan IV (empat) berjumlah 3 orang (15,78%), Golongan III (tiga) berjumlah 13 orang (68,42%), dan yang paling sedikit adalah Golongan II (dua) yang berjumlah 3 orang (15,78%). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

1	Pembina Utama Muda (IV/C)	1	Orang Pria	4.17%
		0	Orang Wanita	0.00%
2	Pembina TK.I (IV/B)	0	Orang Pria	0.00%
		0	Orang Wanita	0.00%
3	Pembina (IV/A)	0	Orang Pria	0.00%
		1	Orang Wanita	4.17%
4	Penata TK.I (III/D)	4	Orang Pria	16.67%
		3	Orang Wanita	12.50%
5	Penata (III/C)	0	Orang Pria	0.00%
		1	Orang Wanita	4.17%
6	Penata Muda TK.I (III/B)	0	Orang Pria	0.00%
		0	Orang Wanita	0.00%
7	Penata Muda (III/A)	5	Orang Pria	20.83%
		2	Orang Wanita	8.33%
8	Pengatur TK.I (II/D)	0	Orang Pria	0.00%
		0	Orang Wanita	0.00%
9	Pengatur (II/C)	1	Orang Pria	4.17%
		2	Orang Wanita	0.00%
10	Pengatur Muda TK.I (II/B)	-	Orang Pria	0.00%
		-	Orang Wanita	0.00%
Jumlah		11	Orang Pria	45.83%
		10	Orang Wanita	41.67%

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

Menduduki jabatan Struktural dan fungsional (Non Angka Kredit) di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselonisasi

No	Jabatan Esselon	Jumlah (orang)	Persentase
1	Esselon II.b	1 Orang Pria	4.17%
		0 Orang Wanita	0.00%
2	Esselon III.a	1 Orang Pria	4.17%
		0 Orang Wanita	0.00%
3	Esselon III.b	1 Orang Pria	4.17%
		1 Orang Wanita	0.00%
4	Esselon IV.a	3 Orang Pria	0.00%
		5 Orang Wanita	20.83%
5	Fungsional Perencana	0 Orang Pria	0.00%
		0 Orang Wanita	0.00%
6	Non Struktural / Fungsional Umum	2 Orang Pria	8.33%
		5 Orang Wanita	0.00%
Jumlah		8 Orang Pria	33.33%
		11 Orang Wanita	45.83%

2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Bappelitbang berupa:

- 1. Peralatan kantor dan mesin memadai,
- 2. Gedung dan bangunan semi permanen,
- 3. Jaringan listrik, air, telepon dan internet yang memadai,
- 4. Aset tetap lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala meliputi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala yang disusun setiap tahun (Murni dan Perubahan Tahun 2018 s/d 2022)
3. Laporan Capaian Kinerja SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan 2017 s/d 2022)
4. Laporan hasil kelitbang (Laporan Kerjasama Penelitian dan Diseminasi Hasil Penelitian)
5. Dokumen Renstra, Renja, dan LKIP Bappelitbang 2018 s/d 2022
6. Laporan Keuangan Bappelitbang 2018 s/d 2022
7. Laporan Kepegawaian 2018 s/d 2022

Tabel 2.5.
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

NO	Indikator	SPM / standar nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian (2018 – 2022)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan usaha KUBE			270	360	125		-	270	360	125	-	
2	Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi yang Menerima Bantuan Stimulan Usaha			60	80	120		160	60	80	120	160	
3	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan kerja			120	180	220		260	120	180	220	260	
4	Jumlah anak yang mendapat pelayanan sosial terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak			120	180	120		180	120	180	120	180	
5	Jumlah lansia potensial yang menerima bantuan stimulan usaha			2	4	6		8	2	4	6	8	
6	Jumlah terkirimnya penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja berbasis panti			4	8	12		16	4	8	12	16	
7	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan stimulan usaha			6	9	12		15	6	9	12	15	

8	Jumlah Lanjut Usia Potensial yang Mendapat Bantuan Stimulan Usaha			75	150	185		220	75	150	185	220	
9	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Pelatihan			120	180	240		300	120	180	240	300	
10	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan jaminan/perlindungan sosial			2612	3918	-		-	2612	3918	-	-	
11	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat			750	1000	1200		1400	750	1000	1200	1400	
12	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemutakhiran Data			17	17	17		17	17	17	17	17	
13	Jumlah Orang Tua yang Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Preventif dan Sikap Mengenai Kekerasan Seksual, Fisik, emosional dan Ekonomi			120	180	240		300	120	180	240	300	
14	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS dan Karang Taruna) yang dibina			-	58	58		73	-	58	58	73	
15	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina			-	17	17		21	-	17	17	21	
16	Jumlah TAGANA yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya			82	123	164		205	82	141	164	205	

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama	4.091.092.145	4.100.771.675	5.599.992.543	7.327.039.203	7.734.832.983	3.791.609.214	2.812.744.260	5.001.173.731	7.057.384.527	7.359.059.122	91,87	79,03	97,62	98,60	95,14	-	-
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.091.092.145	4.100.771.675	5.599.992.543	7.327.039.203	7.734.832.983	3.791.609.214	2.812.744.260	5.001.173.731	7.057.384.527	7.359.059.122	91,87	79,03	97,62	98,60	95,14	-	-



Dari Tabel 2.5. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melalui indikator “*Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri*”, selama periode Renstra Tahun 2017 - 2022 telah tercapai secara maksimal. Keberhasilan Dinas Sosial mewujudkan dalam Peningkatan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan menyelaraskan Dokumen RKPD dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala, dan menyelaraskan Dokumen Renja dengan Renstra SKPD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS SOSIAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Dinas sosial Kabupaten Barito Kuala yang melaksanakan urusan Bidang Sosial memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan urusan sosial.

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

3.1.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala untuk 4 (empat) tahun mendatang.

Analisa lingkungan internal pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, yaitu:

1. Kekuatan, yang dimiliki:
 - a. Tersedianya sumber daya manusia (SDM)/ASN yang ada.
 - b. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
 - c. Berkembangnya kemampuan ASN dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial dari waktu ke waktu.

2. Kelemahan, yang dimiliki:

- a. Ketersediaan *database* PPKS yang terus mengalami perbaikan/verifikasi.
- b. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Belum optimalnya kerjasama antar bidang pada Dinas
- d. Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan, khususnya dalam penanganan PPKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PPKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan dana yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
- e. Adanya Pandemi Covid 19 sejak April 2020 mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana.
- f. Adanya refocusing anggaran menyebabkan program/ kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya terpotong dengan adanya refocusing.

3.1.1.2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas dalam 4 (empat) tahun mendatang (2023-2026). Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

1. Peluang, yang ada:
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Dinas Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
 - b. Kearifan lokal yang ada ditengah kehidupan masyarakat

- c. Keberadaan dunia usaha melalui Program CSR yang mereka miliki
- d. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Dinas Sosial.

2. Ancaman, yang ada:

- a. Tren permasalahan sosial yang terus berkembang sebagai akibat dari adanya krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial
- b. Masih rendahnya komitmen sebagian penerima manfaat program untuk mendukung tercapainya tujuan dari program/kegiatan yang diberikan.
- c. Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi) rendah.
- d. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- e. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PPKS itu sendiri.
- f. Adanya refocusing anggaran untuk pembiayaan penanganan Covid 19 dan banjir di Barito Kuala.

3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dengan identifikasi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, menunjukkan keseimbangan yang positif. Kondisi ini menyiratkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala masih harus meningkatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang sosial

3.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program

Sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang maka penyusunan Visi Misi untuk tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025.

Jadi Visi dan Misi Dinas Sosial Periode 2023-2026 akan mengacu kepada RPD 2023-2026 yang sesuai dengan RPJPD 2005-2025.

Visi Dinas Sosial adalah : **"Barito Kuala Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis"** yang dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Dinas Sosial melaksanakan Misi Pertama, yaitu : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi dan Keunggulan Lokal dengan Mengoptimalkan Pengelolaan SDA dan Sumber Daya Lainnya untuk Menjamin Kelanjutan Pembangunan dan Menjaga Keseimbangan Lingkungan.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI Dan Renstra Dinas Sosial Provinsi

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019-2024 adalah: **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong"**. Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah : **'Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera'**.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai Visi tersebut diatas, ditempuh dengan melaksanakan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeadilan, dan demokratis berdasarkan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang Tinggi, Maju, dan Sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai perangkat daerah yang menangani pembangunan Bidang Sosial terkait dengan penanganan bencana dan pasca bencana di wilayah-wilayah yang rentan bencana.

3.4 Tantangan dan Peluang

Keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholder* yang ada, sehingga dapat diwujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang cukup komprehensif.

3.5.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial yang holistik, komprehensif dan berkelanjutan adalah:

1. Tren Permasalahan Sosial yang terus berkembang sebagai akibat dari adanya krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial.
2. Belum validnya *database* PMKS Kabupaten Barito Kuala
3. Belum adanya SPM Bidang Sosial
4. Belum optimalnya kerja sama antar bidang pada Dinas
5. Belum optimalnya pengintegrasian program dan kegiatan Dinas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
6. Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan, khususnya dalam penanganan PMKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS

memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan dana yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.

7. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
8. Masih rendahnya komitmen sebagian penerima manfaat program untuk mendukung tercapainya tujuan dari program/kegiatan yang diberikan.
9. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri.

3.5.2 Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan adalah:

1. Tersedianya sumber daya manusia (SDM)/ASN pada Dinas.
2. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai
3. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Dinas Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
4. Kearifan lokal yang ada ditengah kehidupan masyarakat
5. Keberadaan dunia usaha melalui program CSR yang mereka miliki
6. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang dapat mendukung peran dan mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, telaahan tujuan dan sasaran Kementerian Sosial, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal.

Data jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Barito Kuala hingga bulan Desember 2022 berjumlah 371245 KK/jiwa, kemudian data ini dilaksanakan verifikasi dan validasi sehingga data yang didapatkan per Desember 2022 berjumlah 133.965 KK/jiwa.

2. Belum Optimalnya Nilai SAKIP DINSOS.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan sosial selama Tahun 2023-2026 sesuai visi dan misi yang ada pada RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

Adapun indikator tujuan Dinas Sosial adalah Tingkat Kemiskinan, sedangkan sasaran Dinas Sosial Tahun 2023-2026 adalah Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Target Kinerja %			
					2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar / Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Batola dikalikan seratus	63	64	65	66

		Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mampu Berusaha / Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Menjadi Sasaran Berusaha dikalikan seratus	1,30	1,31	1,32	1,33
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemkab Batola	Nilai SAKIP Pemkab Batola	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial	"Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja) + (Pengukuran Kinerja) + (Pelaporan Kinerja) + (Evaluasi	70	71	72	73



				Kinerja) + (Capaian Kinerja). Dari hasil nilai tersebut akan dikategorikan pada predikat penilaian SAKIP"				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah tor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan organisasi secara menyeluruh. Pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal Dinas dengan keanekaragamannya.

5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

Analisa lingkungan internal tentang kekuatan dan kelemahan. Juga analisa lingkungan eksternal tentang peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam 4 (empat) tahun mendatang, telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang dimaksudkan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang harus ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 1.

Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program/kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Strategi juga diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Strategi yang disusun, juga harus mengacu dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Dalam mengemban tugas dan wewenangnya, Dinas Sosial harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap pada jalur yang telah ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik untuk aparatur maupun masyarakat yang dilayani.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Pengembangan layanan SLRT dan Poskesos	1.1 Pengembangan Sekretariat SLRT (Sarana prasarana dan sosialisasi). 1.2 Pembentukan Poskesos
		Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2. Verivali DTKS	2.1 Pembaharuan data DTKS
				3. Peningkatan perlindungan Jaminan Sosial	3.1 Fasilitasi Pemberian bantuan BPNT/BLT 3.2 Fasilitasi PKH 3.3 Optimalisasi BPJS dan KIP. 3.4 Pelayanan korban bencana dan paska bencana. 3.5 Penyusunan Perbup tentang pemberian bantuan untuk korban bencana
				4. Peningkatan Kelembagaan	4.1 Pembinaan PSKS, TKS dan LK3 4.2 Pembinaan Nilai-nilai Pejuang/Veteran 4.3 Penyusunan Perbup terkait rekomendasi pengumpulan dana dan undian hadiah. 4.4 Pemberian Rekomendasi pengumpulan Dana dan Undian Hadiah
				5. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.	5.1 Pelatihan keterampilan berusaha 5.2 Pembentukan UEP-KUBE dan UEP-P 5.3 Bantuan peralatan dan perlengkapan rumah tangga untuk KPM RS-RTLH 5.4 Fasilitasi RS-RTLH
				6. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, ketunaan sosial, keterlantaran dan masalah sosial strategis lainnya.	6.1 Pelatihan keterampilan berusaha 6.2 Bantuan untuk disabilitas dan lansia 6.3 Bantuan untuk anak terlantar 6.4 Fasilitasi dan Sosialisasi penyandang masalah sosial lainnya.



		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial		
--	--	---	-----------------------------------	--	--



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dibuat, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala guna mewujudkan visi Pemerintahan Kabupaten melalui pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun -2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	R p	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Tertib Melalui Peningkatan Produktifitas dan Hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah Dalam Rangka Membuka Peluang Kerja yang Berdampak Pada Peningkatan Pendapatan Daerah				Persentase Tingkat Kemiskinan	5,105 Persen	4,68 Persen		4,65 Persen		4,59 Persen		4,54 Persen		0 Persen		4,54 Persen			
	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	2,72 Persen	2,72 Persen		3,34 Persen		3,96 Persen		4,58 Persen		0 Persen		4,58 Persen			
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima	0 Persen	100 Persen	180,000,270	100 Persen	198,000,297	100 Persen	217,800,327	100 Persen	239,580,36	0 Persen	0	100 Persen	0		



			SOSIAL	bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola									0					
		1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha dan keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan	0 Keluarga	105 Keluarga	180,000,270	115 Keluarga	198,000,297	145 Keluarga	217,800,327	155 Keluarga	239,580,360	0 Keluarga	0	155 Keluarga	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan yang dikelola	0 Persen	100 Persen	196,958,820	100 Persen	216,654,702	100 Persen	238,300,372	100 Persen	249,810,189	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	0 Persen	100 Persen	147,490,753	100 Persen	162,239,827	100 Persen	178,463,809	100 Persen	196,310,189	0 Persen	0	67,8 Persen	0	
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan penyandang disabilitas	0 Orang	212 Orang	89,991,210	216 Orang	98,990,331	217 Orang	108,889,364	218 Orang	119,778,300	0 Orang	0	218 Orang	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA



			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	yang mandiri															
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0 Persen	100 Persen	2,266,934,700	00 Persen	0	100 Persen	2,493,628,170	00 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 melalui Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dengan pencapaian Visi dan Misi yang ada, maka harus disusun untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewewenangan Dinas Sosial Kabupten Barito Kuala seperti tercantum dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam pencapaian Misi, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala harus mampu berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 3, yaitu : Meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan Kesehatan, dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangka usaha	8.281	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	7.831
2	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2368	100%	100%	100%	100%	2.238
3	Persentase penyandang Disabilitas yang Mandiri	2759	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	2.734
4	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	100%	100%	100%	100%	0
5	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10540	100%	100%	100%	100%	1.306
6	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Validasi	105.590	20%	20%	20%	20%	100%
7	Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	0	100%	100%	100%	100%	150

8	Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap kekerasan pada anak	0	100%	100%	100%	100%	0
9	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	0	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	261	100%	100%	100%	100%	261

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala periode 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kuala untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan penjabaran Renstra Periode 2023-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan dinas, ketatalaksanaan, SDM, anggaran dan komitmen seluruh jajaran ASN yang ada. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, jika diperlukan, dapat dilakukan perubahab/revisi muatan Renstra, termasuk indikator kinerja yang ada dalamnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Periode 2023-2026.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Periode 2023-2026 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2023-2026.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang akan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Barito Kuala pada setiap tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.